



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **PERUBAHAN**

## **TAHUN 2025**



# **DINAS PERTANIAN**

# **KABUPATEN BULELENG**





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025.

Dalam urusan pilihan pertanian Rencana Kerja ini merupakan rencana kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Perubaan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Singaraja, 26 Pebruari 2024

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng



**Gede Melandrat,SP**

Pembina Tk I / IV.b

NIP. 1972071219980310



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		i
<b>DAFTAR ISI</b>		ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU</b>	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	35
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	43
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	46
	2.5 Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN DINAS PERTANIAN</b>	57



	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	57
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian	.....	58
	3.3 Program dan Kegiatan	.....	59
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN</b>	.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	.....	66



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat di sektor pertanian dan sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja



Perubahan (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pertanian dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala OPD, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Pertanian dalam arti luas.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian Buleleng dengan perannya yang multi fungsi. Secara proporsional sektor pertanian merupakan sektor paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng.

Mencermati kondisi dan potensi ekonomi Kabupaten Buleleng yang berbasis pertanian dan pariwisata serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan pedesaan, maka pembangunan pertanian dalam arti luas, industri kecil dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan perekonomian Bali menjadi domain agenda prioritas pembangunan ekonomi. Penjabaran kebijakan pembangunan ekonomi tersebut salah satunya adalah mensinergikan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.

Perkembangan proses pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng sudah dilakukan melalui berbagai program untuk peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis serta peningkatan kesejahteraan petani, namun masih terkendala berbagai permasalahan dan kedepannya tantangan akan semakin berat mengingat keberadaan sumber daya alam dan perkembangan global. Permasalahan yang dominan dihadapi saat ini adalah rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani atau pelaku usaha



dibidang pertanian dan tingginya alih fungsi lahan pertanian. Saat ini rata-rata umur petani di Kabupaten Buleleng adalah diatas 50 tahun. Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani atau pelaku usaha pertanian adalah persepsi bahwa usaha pertanian itu tidak menjanjikan keuntungan secara ekonomi. Dan Bali yang sangat ketergantungan dengan sektor pariwisata, menjanjikan pendapatan yang lebih dibandingkan dengan sektor pertanian. Inilah yang menyebabkan generasi muda saat ini lebih memilih menggeluti sektor pariwisata dibandingkan sektor pertanian. Hal ini menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa berusaha tani atau menjadi pelaku usaha pertanian bisa menguntungkan secara ekonomi. Sehingga laju alih fungsi lahan bisa dikurangi dan generasi muda berminat untuk menjadi petani. Untuk itu dibutuhkan gagasan dan strategi mengelola potensi pertanian di Kabupaten Buleleng.

Upaya dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan pertanian diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, dokumen tersebut antara lain adalah Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perubahan. Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perubahan 2025 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan



tahunan yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perubahan antar SKPD dan Kecamatan.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1(satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2026 serta sebagai evaluasi dari pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dari urusan pertanian.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahann Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);



13. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 No. 9)
14. Peraturan Bupati Buleleng No. 12. Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2023 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah, acuan dan sekaligus pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025:

1. Sebagai acuan Dinas Pertanian dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Terwujudnya pemahaman, kesatuan langkah, sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2025 ;
3. Terwujudnya kepastian dan kejelasan pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2025;
4. Tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**



Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah 2025 dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun  $n-2$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun  $n-1$ ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada



Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Pertanian**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN**

Berisikan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Pertanian yang sudah disepakati.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:



- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tandatangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng**

Rencana Kerja merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Dinas Pertanian mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng serta realisasi APBD.

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan pertanian maka program pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 terdiri dari 6 program, 19 kegiatan, dan 47 sub kegiatan. Sedangkan untuk membiaya kegiatan pada tahun anggaran 2023 pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng diperoleh dari alokasi Pagu anggaran belanja APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 42.394.097.543,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.272.554.004,-. Atau realisasi keuangan sebesar 92,64% dan realisasi fisik 97,96 % dari rencana. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan per program adalah sebagai berikut :



# 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - d) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - a) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
  - c) Penyediaan Bagan Logistik Kantor
  - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Pengadaan Mebel
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
  - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
    - a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
    - b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
  - 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
    - a) Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman
    - b) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
  - 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    - a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- 3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
  - 1) Pengembangan Prasarana Pertanian
    - a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
    - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
  - 2) Pembangunan Prasarana Pertanian
    - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
    - b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
    - c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
    - d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
  - 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
  - 2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kab/kota
    - a) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner



3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

a) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

c) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

d) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota



## REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Alokasi Anggaran : Rp. 22.121.849.177,-**

**Realisasi Anggaran : Rp. 21.594.266.859,- (97.62%)**

#### 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 267.100.048,-

Realisasi Anggaran : Rp. 252.360.395,- (94,48%)

Hasil : Persentase realisasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran 94,48 %.

##### a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 141.190.048,-

Realisasi Anggaran : Rp. 130.276.917,- (92,27%)

Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, realisasi anggaran 92,27 %.

##### b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 125.910.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 122.083.478,- (96,96%)

Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran 96,96%

#### 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 20.663.152.537,-

Realisasi Anggaran : Rp. 20.242.985.964,- (97,97%)

Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggaran 97,97%

##### a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 20.484.785.937,-

Realisasi Anggaran : Rp. 20.067.426.192,- (97,96%)

Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi anggaran 97,96 %

##### b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 1.280.000,-



Realisasi Anggaran : Rp. 836.000,- (65,31%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN , realisasi anggaran  
 65,31 %.

**c) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD**

Alokasi Anggaran : Rp. 24.130.064,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 22.817.476,- (94,56 %)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan  
 SKPD, realisasi anggaran 94,56 %

**d) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran**

Alokasi Anggaran : Rp. 152.956.536,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 151.906.296,- (99,31%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran,  
 realisasi anggaran 99,31 %

**3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Alokasi Anggaran : Rp. 56.912.872,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 54.143.792,- (95,13%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan  
 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, realisasi  
 anggaran 95,13 %

**a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Alokasi Anggaran : Rp. 56.912.872,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 54.143.792,- (95,13%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan  
 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, realisasi  
 anggaran 95,13 %

**4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Alokasi Anggaran : Rp. 3.917.260,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 2.417.000,- (61,70%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan  
 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggaran 61,70%

**a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Alokasi Anggaran : Rp. 3.917.260,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 2.417.000,- (61,70%)



Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggaran 61,70%

#### 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 25.313.700,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 24.160.800,- (95,45 %)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggaran 95,45 %

##### a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 313.700  
 Realisasi Anggaran : Rp. 313.500,- (99,94 %)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, realisasi anggaran 99,94 %

##### b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Alokasi Anggaran : Rp. 25.000.000,0  
 Realisasi Anggaran : Rp. 23.847.300,- (95,39%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, realisasi anggaran 95,39%

#### 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 375.529.142,-,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 334.148.640,- (88,98%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi anggaran 88,98%.

##### a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 35.037.150,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 33.294.414,- (95,03%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran 95,03%.

##### b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 100.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 73.317.616,- (73,32%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran 73,32%.



**c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Alokasi Anggaran : Rp. 96.254.120  
 Realisasi Anggaran : Rp. 94.300.050,- (97,97%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran  
 97,97%

**d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Alokasi Anggaran : Rp. 12.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 9.279.800,- (77,33%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,  
 realisasi anggaran 77,33%.

**e) Fasilitas Kunjungan Tamu**

Alokasi Anggaran : Rp. 70.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 69.999.975,- (100%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Fasilitas Kunjungan Tamu, realisasi anggaran 100%.

**f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Alokasi Anggaran : Rp. 62.237.872,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 53.956.785,- (86,69%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi  
 anggaran 86,69%.

**7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi Anggaran : Rp. 495.763.992,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 471.391.161,- (95,08%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan  
 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi  
 anggaran 95,08%

**a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Alokasi Anggaran : Rp. 10.250.000,-,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 9.529.800,- 92,97%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran 100%

**b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Alokasi Anggaran : Rp. 179.351.000,-



Realisasi Anggaran : Rp. 170.411.191,- (95,02%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi anggaran 95,02%

**c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Alokasi Anggaran : Rp. 268.280.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 260.358.795,- (97,05)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran 97,05%

**d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Alokasi Anggaran : Rp. 37.882.992,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 31.091.375,- (82,07)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi anggaran 82,07%

**8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi Anggaran : Rp. 231.120.001,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 209.995.107,- (90,86)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , realisasi anggaran 90,86%

**a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Alokasi Anggaran : Rp. 95.120.001,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 76.061.232,- (79,96)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran 79,96%

**b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Alokasi Anggaran : Rp. 125.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 123.933.875,- (99,15)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, realisasi anggaran 99,15%



**c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Alokasi Anggaran : Rp. 11.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 10.000.000,- (90,91%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi anggaran 90,91%.

**2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

**Alokasi Anggaran : Rp. 2.631.473.878,-**

**Realisasi Anggaran : Rp. 2.568.292.257,- (97,60%)**

**1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 1.064.275.965,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.045.185.688,- (98,21%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian , realisasi anggaran 98,12%

**a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**

Alokasi Anggaran : Rp. 202.331.160,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 197.819.562,- (97,77%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi , realisasi anggaran 97,77%

**b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 861.944.805,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 847.366.126,- (97,63%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian , realisasi anggaran 97,63%

**2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**

Alokasi Anggaran : Rp. 1.542.197.913,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.498.817.069,- (97,19%)



Hasil : realisasi kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota, realisasi anggaran 98,32%

**a) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**

Alokasi Anggaran : Rp. 426.013.052,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 414.073.966,- (97,20%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, realisasi anggaran 97, %

**3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

Alokasi Anggaran : Rp. 25.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 24.289.500,- (97,16%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi anggaran 97,16%

**a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil**

Alokasi Anggaran : Rp. 25.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 24.289.500,- (97,16%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil, realisasi anggaran 97,16%

**3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

**Alokasi Anggaran : Rp. 935.309.238,-**  
**Realisasi Anggaran : Rp. 929.846.236,- (99,42%)**

**1) Pengembangan Prasarana Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 435.309.238,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 429.846.236,- (98,75%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, realisasi anggaran 98,75%

**a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B**

Alokasi Anggaran : Rp. 202.589.478,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 197.841.084,- (97,66%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, realisasi anggaran 97,66%

**b) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya**

Alokasi Anggaran : Rp. 232.719.760,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 232.005.152,- (99,69%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, realisasi anggaran 99,69%

**2) Pembangunan Prasarana Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 500.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 500.000,000,- (100%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, realisasi anggaran 100%

**a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**

Alokasi Anggaran : Rp. 150.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 150.000.000,- (100%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ,realisasi anggaran 100%

**b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. -  
 Realisasi Anggaran : Rp. -  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, realisasi anggaran -

**c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**

Alokasi Anggaran : Rp. 350.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 350.000.000,- (100%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, realisasi anggaran 100%

**d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**



Alokasi Anggaran : Rp. -  
 Realisasi Anggaran : Rp. -  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian  
 Lainnya, realisasi anggaran -

#### 4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

**Alokasi Anggaran : Rp. 735.566.080,-**  
**Realisasi Anggaran : Rp. 697.226.687,- (94,79%)**

##### 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 510.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 472.335.485,- (92,61%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 92,61%

##### a) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Alokasi Anggaran : Rp. 510.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 472.335.485,- (92,61%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, realisasi anggaran 92,61%

##### 2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 169.260.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 168.628.770,- (99,63%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan atas Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 99,36%

##### a) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Alokasi Anggaran : Rp. 169.260.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 168.628.770,- (99,63%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, realisasi anggaran 99,63%



### 3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Alokasi Anggaran : Rp. 56.306.080,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 56.662.432,- (99,92%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, realisasi anggaran 99,92%

#### a) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Alokasi Anggaran : Rp. 54.663.280,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 54.662.432,- (99,99%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Penerapan dan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, realisasi anggaran 99,99%

#### b) Jumlah alat dan mesin peternakan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.642.800,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.600.000,- (97,39%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, realisasi anggaran 97,39%

## 5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Alokasi Anggaran : Rp. 794.507.031,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 684.781.759,- (86,19%)

### 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 794.507.031,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 684.781.759,- (86,19%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 86,19%

#### a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Alokasi Anggaran : Rp. 211.208.400,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 208.733.505,- (98,83%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, realisasi anggaran 98,83%

**b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Alokasi Anggaran : Rp. 109.200.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 106.622.998,- (97,64%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, realisasi anggaran 97,64%

**c) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis**

Alokasi Anggaran : Rp. 420.711.669,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 316.038.300,- (75,12%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis , realisasi anggaran 75,12%

**d) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Alokasi Anggaran : Rp. 53.386.962,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 53.386.956,- (100%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, realisasi anggaran 100%

**6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

**Alokasi Anggaran : Rp. 1.847.763.600,-**  
**Realisasi Anggaran : Rp. 1.415.172.298,- (99,78%)**

**1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 1.847.763.600,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.415.172.298,- (99,78%)  
 Hasil : realisasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, realisasi anggaran 99,78%

**a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**

Alokasi Anggaran : Rp. 1.326.279.600,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.323.302.125,- (99,78%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, realisasi anggaran 99,78%

**b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**

Alokasi Anggaran : Rp. 408.607.360,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 403.644.080,- (98,79%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, realisasi anggaran 98,79%

**c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 20.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 18.538.924,- (92,69%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, realisasi anggaran 92,69%

**d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota**

Alokasi Anggaran : Rp. 92.876.640,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 91.870.173,- (98,92%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 98,92%

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d tahun 2022 (tahun berjalan) Kabupaten Buleleng dalam bentuk tabel 2.1 berikut.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2023	Realisasi	%	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Persentase peningkatan produksi pertanian (%)	48,18	59,01	132,18	223,99	66,30	73,07	79,53
2	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri	Persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri (%)	2,85	2,97	10,91	367,74	3,08	3,19	3,30
3	Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern	Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi %	3,00	3,10	10,38	334,76	3,11	3,12	3,13

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 308,73 %, dikategorikan sangat baik. Pencapaian ini diantaranya disebabkan karena terjalinnya sinergi antara sumberdaya manusia baik petani maupun petugas sebagai pelaku utama di sektor pertanian dengan sumber daya alam yang dimiliki melalui pelaksanaan kegiatan yang sudah dirinci berdasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat yang didukung dari pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sasaran meningkatnya produksi pertanian yang maju dengan indikator kinerja berupa persentase peningkatan produksi pertanian (%) dengan target di tahun 2024 sebesar 59,01 % dan hasil pencapaian 132,18 % dengan katagori Baik Sekali, hal tersebut di peroleh dari capaian indikator bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu Jumlah benih ternak straw, jumlah petugas IB yang berkompeten, Jumlah penangkar benih berkompeten, Jumlah sumber benih berkualitas, jumlah pestisida nabati, jumlah vaksin hewan (Ekor), jumlah tempat pelayanan peternakan, jumlah alat dan mesin peternakan, jumlah jalan pertanian yang memadai dan jumlah alat mesin pasca panen.



### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Terkait perubahan perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dimana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buleleng melebur menjadi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan Tipe A sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan kehutanan tidak lagi ada di Kabupaten namun ke Provinsi. Dan perubahan terakhir diatur dalam peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 tahun 2023 tanggal 6 januari 2023 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

Sinergitas dalam pelayanan dilaksanakan bersama-sama baik dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali maupun dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali diwujudkan dalam bersama-sama mewujudkan program SIMANTRI (Sistem Pertanian Terintegrasi). Sedangkan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali adalah



bersama-sama dalam penanggulangan Rabies. Untuk sinergitas dengan Kementerian Pertanian adalah adanya kegiatan APBN dengan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng melalui eproposal dan Krisna DAK.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng antara lain :

- Kompetisi penggunaan lahan terutama pada lahan pertanian (alih fungsi) akan semakin meningkat, akibat pembangunan sektor non-pertanian;
- Masih lemahnya kemampuan manajerial, teknis dan penerapan teknologi tepat guna baik di tingkat aparatur maupun kelembagaan tani;
- Masih lemahnya kemampuan petani/keompok tani dalam mengakses permodalan, jejaring pasar dan sistem kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar petani;
- Dampak negatif pemanasan bumi (*global warming*) menyebabkan terjadinya dinamika iklim;
- Belum adanya standar pelayanan untuk memfasilitasi kegiatan usaha di sektor pertanian dan peternakan;
- Alih teknologi pertanian masih rendah;
- Rendahnya kualitas produk pertanian dan peternakan;
- Lemahnya kelembagaan tani;
- Sistem koordinasi antar lembaga masih lemah;
- Peranan institusi dan lembaga pemasaran masih rendah;
- Masih adanya penyakit hewan menular strategis.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

#### a. Tantangan

Dalam pelaksanaan urusan pertanian, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan
- Lahan kritis dan cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan perkembangan tanaman;
- Gangguan penyakit dari hewan ke manusia seperti rabies dan flu burung;



- Masih ditemukannya penggunaan bahan kimia yang membahayakan kesehatan antara lain, chlorine, formalin, residu pestisida pada sayuran, beras, buah-buahan, daging, susu, dan telur
- Lemahnya posisi tawar dan akses permodalan untuk membiayai usahanya
- Masih rendahnya SDM petani sehingga kemampuan dalam mengelola usahanya kurang optimal
- Masih rendahnya SDM petani dalam mengakses dan menggunakan teknologi pertanian terkini

#### b. Peluang

Adapun peluang dalam menjawab tantangan tersebut adalah:

- Kebijakan yang diambil dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian;
- Komitmen Pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan;
- Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;
- Kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit zoonosis tinggi.

Rumusan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditidakklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 yaitu:

1. Kondisi pertanian masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, pangan dan perkebunan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus.
2. Produk hasil pertanian, pangan dan perkebunan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian baik petugas maupun petani.
4. Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha pertanian.

Selain itu terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu:



1. Belum stabilnya tingkat peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura
  - Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang belum sepenuhnya dapat mengadopsi teknologi pertanian
  - Anomali iklim yang tidak dapat diprediksi
  - Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan
2. Tingginya penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam usaha tani Hal ini dapat diatasi dengan :
  - Pengembangan penggunaan pupuk organik dalam budidaya
  - Pengembangan penggunaan pestisida organik
  - Rintisan budidaya pertanian organik

Kesadaran petani akan pentingnya penggunaan pestisida organik perlu ditingkatkan, karena residu pestisida organik akan berdampak pada kesehatan manusia dan juga lingkungan disekitarnya. Selain itu budidaya pertanian organik ini juga ditunjang oleh populasi hama dan penyakit tanaman yang juga dipengaruhi oleh iklim dan musim sebagai contoh musim penghujan dengan curah hujan intensitas yang tinggi akan berdampak pada munculnya hama dan penyakit tanaman.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pembangunan pertanian Kabupaten Buleleng sebagaimana Rancangan awal RPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2025 merupakan rangkaian tahapan pencapaian Visi Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

Berkaitan dengan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam mengatasi isu strategis yang ada, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik itu dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi pembangunannya.

Namun disisi lain Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian. Dari uraian tersebut, tugas Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 sangat kompleks dan membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada

tahun 2025 rencana anggaran yang dialokasi untuk Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebesar Rp.31.800.000.000,-.

Dilihat dari rancangan akhir RPD sebesar Rp. 31.800.000.000,- maka seluruh kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng diadopsi dalam rancangan akhir RPD ini.

Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang disusun pada tahun 2025 harus benar dilaksanakan. Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.4

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari proposal yang disampaikan secara langsung, maupaun dalam usulan yang berasal dari Musrenbang. Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Pemangku Kepentingan (stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Selain itu masih ada kegiatan Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD untuk menampung usulan-usulan dari stakeholder terkait.

Seluruh bentuk Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Buleleng Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.5.



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada RPJMN 2020-2024, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Selain Kedaulatan Pangan yang ada dalam Nawa Cita, juga terdapat Peningkatan Agro industri sebagai bagian dari agenda 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kedaulatan pangan dan Agro industri menjadi bagian dalam upaya mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri. Dari kedua sub agenda kedaulatan pangan dan peningkatan agro industri, maka Kementerian Pertanian hadir dengan visi "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Tercapainya visi tersebut dapat dilihat dari sejauh mana sasaran strategis yang ditetapkan lima tahun kedepan, yang meliputi 1) meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; 2) terjaminnya distribusi pangan; 3) meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; 4) meningkatnya konsumsi pangan lokal; 5) stabilnya produksi cabai dan bawang merah; 6) berkembangnya produk bernilai tambah dan berdaya saing; 7) tersedianya bahan baku bio industry dan bio energi; 8) meningkatnya kualitas sumber daya insane petani; 9) meningkatnya pendapatan keluarga petani; 10) meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian; serta 11) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.



Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun empat kebijakan yaitu (1) melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, (2) melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan, (3) membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional, serta (4) Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana urusan pilihan pemerintahan daerah di bidang Pertanian di Kabupaten Buleleng merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dengan kebijakan nasional antara lain:

- Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha
- Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah
- Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Buleleng dari masing-masing komponen pembangunan

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting)

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian rancangan awal Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah “Peningkatan produksi mutu, daya saing dan pemasaran komoditas



pertanian” Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju  
Indikator : Persentase peningkatan produksi pertanian (%)
2. Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri  
Indikator : Persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri (%)
3. Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern  
Indikator : Persentase produksi pertanian dengan teknologi(%)

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan berupa RENJA sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur pembangunan pertanian wilayah Kabupaten Buleleng
- Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik
- Terciptanya koordinasi internal antar bidang yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang akan ditempuh, maka Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mencanangkan program dan kegiatan sebagai berikut :



## 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - (4) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - (1) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - (2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - (5) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - (2) Pengadaan Mebel
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

### a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- (1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- (2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

### b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota

- (1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
- (2) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

### c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- (1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

### d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- (1) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- (2) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

## 3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

### a. Pengembangan Prasarana Pertanian

- (1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

### b. Pembangunan Prasarana Pertanian



- (1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
  - (2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
  - (3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - (4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
  - (5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
  - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    - (1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
  - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
  - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
    - (2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
  - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
    - (1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
    - (2) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
    - (3) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota



- (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- (2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- (3) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
- (4) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

## 6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

### a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- (1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- (2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- (3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- (4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dengan rincian 5 program, 8 kegiatan, dan 21 sub kegiatan adalah urusan pilihan pertanian dan 1 program, 9 kegiatan, 25 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekretariat;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 secara total sebesar Rp. 31.800.000.000,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buleleng.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Buleleng Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 3.1. Dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Strategis tahun 2023 – 2026 dapat dilihat berdasarkan table 3.2.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Buleleng. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Singaraja, 20 Juni 2025

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng



**Gede Melandrat,SP**

Pembina Tk I / IV.b

NIP. 1972071219980310

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Dinas Pertanian Kab.Buleleng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran		Awal (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Produksi Pertanian yang berdaya saing	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Persentase peningkatan produksi Pertanian (%)			48.18	59.01	66.30	73.07	79.53
				Jumlah benih ternak (straw) unggul (ekor)	PKH	16,000.00	17,000	18,000	19,000	20,000
				Jumlah petugas yang berkompeten (orang)	PKH	20	25	30	35	38
				Jumlah Penangkar Benih Berkompeten (kelompok)	horti	6	7	8	9	10
					TP	7	8	9	10	11
					BUN	2	3	4	5	6
				Jumlah Sumber Benih Berkualitas (kelompok)	TP	1	1	1	1	1
					HORTI	13	14	15	16	17
					BUN	1	1	1	1	1
				Jumlah pestisida nabati (jenis)	HORTI	1	5	6	7	8
				Jumlah obat/vaksin peternakan (dosis)	PKH	1,500	2,000	2,500	2,750	3,000
				(lokasi)	PKH	9	10	10	10	10
				Jumlah alat dan mesin peternakan (paket)	PKH	1	1	1	1	1
				Jumlah sumber air pertanian (paket)	PSP	3	4	5	6	7
				Jumlah jalan pertanian yang memadai (paket)	PSP	1	2	3	4	5
				Jumlah alat mesin pertanian (paket)	PSP	3	3	3	3	3
				Jumlah alat mesin pasca panen (paket)	BUN	5	8	9	10	11
					HORTI					
					TP					
	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri	Persentase Kelembagaan Petani dan pelaku usaha yang Mandiri (%)				2.85	2.97	3.08	3.19	3.30
				Jumlah SDA Pertanian berpotensi (kelompok)	penyuluhan	5	6	7	8	9
				Jumlah Potensi wilayah (lokasi)	penyuluhan	9	9	9	9	9
				Jumlah Penyuluh bersertifikat (orang)	penyuluhan	47	48	49	50	51
				Jumlah Penyuluh swadaya (orang/kelompok)	penyuluhan	6	8	10	12	14
				Jumlah petani/Poktan/gapoktan dgn skor kemampuan Klas Madya (kelompok)	penyuluhan	70	71	72	73	74
				Jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis (unit)	PKH	9	9	9	9	9
				Jumlah sarpras pertanian dan peternakan (unit)	PKH	9	9	9	9	9
				Jumlah fasilitas pendukung smartfarming (kelompok)	penyuluhan	1	2	3	4	5
				Jumlah POKTAN dengan biaya swadaya (kelompok)	penyuluhan	5	6	7	8	9
				Jumlah POKTAN yang dibiayai lembaga keuangan (kelompok)	PSP	9	18	27	36	45

		<b>Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern</b>	<b>Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi %</b>		<b>3</b>	<b>3.10</b>	<b>3.11</b>	<b>3.12</b>	<b>3.13</b>
				TP	0	1	2	3	4
			jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI (jenis)	horti	1	1	1	1	1
				bun	1	2	3	3	3
				PKH	1	1	1	1	1
			Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna (kelompok)	horti	0	1	1	1	1
				PKH	0	1	1	1	1
				bun	0	1	1	1	1
				PEYULUHAN	1	1	1	1	1
			Jumlah hasil produksi pertanian ;	jumlah Produksi	308,289.50	317,846.47	317,877.30	317,908.13	317,938.96
			Produksi padi (Ton)	TP	106,660.50	109,966.98	109,977.64	109,988.31	109,998.97
			Produksi palawija (Ton)	TP	37,033.00	38,181.02	38,184.73	38,188.43	38,192.13
			Produkai Hortikultura (Ton)	HORTI	137,855.00	142,128.51	142,142.29	142,156.08	142,169.86
			Produkai Perkebunan (Ton)	BUN	19,000.00	19,589.00	19,590.90	19,592.80	19,594.70
			Produkai Daging (Ton)	PKH	7,741.00	7,980.97	7,981.75	7,982.52	7,983.29
			Populasi sapi (Ekor)		149,305	149,610	149,915	150,220	150,525
			Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara online (jenis)	TP	13	16	17	18	19
				BUN					
				HORTI					
				PKH					
			Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara offline (jenis)	TP	7	8	9	10	11
				BUN	6	7	8	9	10
				HORTI	44	45	46	47	48
				PKH	3	4	5	6	7
			Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian (mitra usaha)	TP	4	5	6	7	8
				BUN					
				HORTI					
			Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti (mitra usaha)	BUN	1	1	2	2	3
				HORTI	3	4	5	6	7
				PKH	1	1	1	1	1
		<b>Meningkatnya tata kelola adminitrasi perkantoran</b>	<b>Persentase capaian fisik dan keuangan (persen)</b>	Sekretariat	100	100	100	100	100

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BULELENG TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN							36.215.843.196,00	30.064.303.581,00	31.619.808.542,00	-4.596.034.654,00							43.272.755.397,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							36.215.843.196,00	30.064.303.581,00	31.619.808.542,00	-4.596.034.654,00							43.272.755.397,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							36.215.843.196,00	30.064.303.581,00	31.619.808.542,00	-4.596.034.654,00							43.272.755.397,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	29.420.828.196,00	25.928.909.601,00	26.773.481.229,00	1.484.127.202,00							30.904.955.398,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai perundangan				26 dokumen	26 dokumen	85.000.000,00	137.959.030,00	193.772.496,00	108.772.496,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		292.973.397,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				26 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	66.409.686,00	62.942.751,00	27.942.751,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			171.749.397,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	27 Laporan	39.400.000,00	60.449.344,00	125.657.344,00	86.257.344,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			121.224.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000,00	5.800.000,00	2.950.000,00	-2.350.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	5.300.000,00	5.300.000,00	2.222.401,00	-3.077.599,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan				135 dokumen	135 dokumen	28.425.895.600,00	23.852.618.926,00	23.849.318.926,00	-4.576.576.674,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		28.667.911.804,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/ bulan	255 Orang/ bulan	28.408.895.600,00	23.723.722.284,00	23.723.722.284,00	-4.685.173.316,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			28.434.555.604,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	-800.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			11.112.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	29.217.270,00	26.717.270,00	20.717.270,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			40.408.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	93.679.372,00	93.679.372,00	88.679.372,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			181.836.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset BMD Daerah				36 laporan	36 laporan	13.800.000,00	31.589.884,00	952.643.925,00	938.843.925,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		70.714.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				36 Laporan	12 Laporan	13.800.000,00	31.589.884,00	952.643.925,00	938.843.925,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			70.714.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah				12 dokumen	12 dokumen	6.200.000,00	5.257.180,00	3.542.230,00	-2.657.770,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		10.102.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	5.257.180,00	3.542.230,00	-2.657.770,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			10.102.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	131.533.484,00	131.001.333,00	121.001.333,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		373.774.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	12.500.000,00	12.210.000,00	7.210.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			80.816.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	119.033.484,00	118.791.333,00	113.791.333,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			292.958.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	334.932.596,00	515.647.211,00	415.793.351,00	80.860.755,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		441.457.400,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	9.679.200,00	-320.800,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			25.255.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	11 Paket	179.932.596,00	280.797.211,00	245.276.101,00	65.343.505,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			101.020.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	50.000.000,00	100.850.000,00	100.550.000,00	50.550.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			101.020.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			12.122.400,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	30.000.000,00	29.908.750,00	19.908.750,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			101.020.000,00	DINAS PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	50 Laporan	80.000.000,00	94.000.000,00	30.379.300,00	-49.620.700,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			101.020.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang Pengadaan BMD</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	5.940.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		50.955.397,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			35.802.397,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	5.940.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			15.153.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang kegiatan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah</i>				157 laporan	157 laporan	485.000.000,00	826.494.406,00	805.384.488,00	320.384.488,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		787.956.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	35.932.075,00	35.839.857,00	30.839.857,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			73.744.600,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				35 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	333.048.701,00	333.048.701,00	113.048.701,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			252.550.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	255.000.000,00	279.210.000,00	252.529.800,00	-2.470.200,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			259.621.400,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	178.303.630,00	183.966.130,00	178.966.130,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			202.040.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>				53 laporan	53 laporan	60.000.000,00	421.869.480,00	417.584.480,00	357.584.480,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		209.111.400,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				40 Unit	14 Unit	50.000.000,00	395.369.480,00	356.809.480,00	306.809.480,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			133.346.400,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			50.510.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	26.500.000,00	60.775.000,00	50.775.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			25.255.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Sarana Pertanian yang unggul				48,18 %	48,18 %	1.282.210.000,00	1.051.953.455,00	1.660.163.375,00	3.717.790.000,00							5.000.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian				21 Laporan	21 Laporan	370.000.000,00	276.133.010,00	320.347.769,00	-49.652.231,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		1.352.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				24 Laporan	12 laporan Laporan	320.000.000,00	178.001.272,00	169.911.272,00	-150.088.728,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			912.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	98.131.738,00	150.436.497,00	100.436.497,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			440.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme				96 Dokumen	96 Dokumen	565.210.000,00	422.018.845,00	401.263.845,00	-163.946.155,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		1.824.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	108.344.538,00	92.929.538,00	-157.070.462,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			912.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	315.210.000,00	313.674.307,00	308.334.307,00	-6.875.693,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			912.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan				78 Laporan	78 Laporan	347.000.000,00	353.801.600,00	938.551.761,00	591.551.761,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		1.824.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	12 Laporan	347.000.000,00	353.801.600,00	938.551.761,00	591.551.761,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			1.824.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prasarana Pertanian yang Unggul (%)				77,30 %	77,30 %	3.018.067.000,00	196.270.600,00	228.153.750,00	481.933.000,00							3.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian				41 Laporan	41 Laporan	150.000.000,00	114.070.600,00	103.483.750,00	-46.516.250,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		675.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	75.693.930,00	69.843.930,00	19.843.930,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			295.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	38.376.670,00	33.639.820,00	-66.360.180,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			380.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian				4 Unit	4 Unit	2.868.067.000,00	82.200.000,00	124.670.000,00	-2.743.397.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		2.825.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	157.373.330,00	0,00	0,00	-157.373.330,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	0,00	45.500.000,00	-204.500.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.384.493.670,00	0,00	0,00	-1.384.493.670,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	1.076.200.000,00	82.200.000,00	79.170.000,00	-997.030.000,00	Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			725.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kelompok tani / ternak yang berbudidaya secara intensif				100 %	100 %	1.797.175.000,00	175.313.352,00	753.495.422,00	-797.175.000,00							1.000.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian kesehatan hewan/penyakit hewan				25 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		615.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			615.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus penyakit ternak mencapai target				100 %	100 %	616.500.000,00	72.491.698,00	651.813.768,00	35.313.768,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				9 Laporan	9 Laporan	540.000.000,00	72.491.698,00	651.813.768,00	111.813.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			0,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																			
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				9 Laporan	9 Laporan	76.500.000,00	0,00	0,00	-76.500.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	1.150.675.000,00	102.821.654,00	101.681.654,00	-1.048.993.346,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan																			
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				9 Orang	9 Orang	1.098.675.000,00	0,00	0,00	-1.098.675.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			0,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																			
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	52.000.000,00	102.821.654,00	101.681.654,00	49.681.654,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan penanganan bencana pertanian				100 %	100 %	180.063.000,00	225.632.630,00	195.252.630,00	369.937.000,00							550.000.000,00		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				50 Ha	50 Ha	180.063.000,00	225.632.630,00	195.252.630,00	15.189.630,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				65 Ha	65 Ha	50.000.000,00	28.960.000,00	26.520.000,00	-23.480.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			135.325.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				50 Ha	50 Ha	50.000.000,00	59.178.164,00	48.378.164,00	-1.621.836,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			135.325.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																			
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				9 laporan	9 laporan	30.063.000,00	118.994.466,00	114.134.466,00	84.071.466,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			135.325.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				9 Laporan	9 Laporan	50.000.000,00	18.500.000,00	6.220.000,00	-43.780.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			144.025.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis				50 %	50 %	517.500.000,00	2.486.223.943,00	2.009.262.136,00	1.800.299.999,00							2.317.799.999,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan yang melakukan intensifikasi pengelolaan pertanian dan peternakan (%)				50 %	50 %	517.500.000,00	2.486.223.943,00	2.009.262.136,00	1.491.762.136,00			-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	-		2.317.799.999,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	142.500.000,00	372.559.065,00	355.654.525,00	213.154.525,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			1.437.338.529,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	111.043.932,00	97.543.932,00	-2.456.068,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			316.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				4 Unit	2 Unit	75.000.000,00	1.913.674.384,00	1.094.730.167,00	1.019.730.167,00	Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak Kab. Buleleng, Tejakula, Tejakula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			90.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	88.946.562,00	39.533.512,00	-160.466.488,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			52.261.470,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	74 Orang	0,00	0,00	421.800.000,00	421.800.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan			421.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H								36.215.843.196,00	30.064.303.581,00	31.619.808.542,00	195.230.006.671,42							43.272.755.397,00	